

**ANALISIS MANAJEMEN DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN MUTU
PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 024184 BINJAI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Tinggi*

Oleh :

MILAYANTI SIREGAR

NPM : 1920060081



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MILAYANTI SIREGAR**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920060081**
Prodi / Konsentrasi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**
Judul Tesis : **Analisis Manajemen Dana Bos Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai.**

Pengesahan Tesis

Medan, 16 Maret 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Akrim, M.Pd

Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si, CIQnR

UMSU

Diketahui

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH. M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si, CIQnR

PENGESAHAN

**ANALISI MANAJEMEN DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN MUTU
PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 024184 BINJAL**

MILAYANTI SIREGAR

1920060081

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Maret 2022

Komisi Penguji

1. **Dr. SRI NURABDIAH PRATIWI, M.Pd**

Ketua

1.....
Pratiwi

2. **Dr. AMINI, M.Pd**

Sekretaris

2.....
Amini

3. **Prof. Dr. ELFRIANTO, M.Pd**

Anggota

3.....
Elfrianto

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS MANAJEMEN DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 024184 BINJAI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Maret 2022

Penulis



MILAYANTI SIREGAR

NPM : 1920060081

ANALISIS MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 024184 BINJAI

MILAYANTI SIREGAR
1920060081

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 024184 Binjai. Sumber data berasal dari kepala sekolah, pengawas, guru dan komite sekolah di SD Negeri 024184 Binjai melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menemukan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri di Kecamatan Hutaraja Tinggi setiap tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana pertambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2019. Ada partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif dalam pengelolaan dana BOS. Perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Rayon IV yaitu korwil Kecamatan Hutaraja Tinggi, dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana BOS di SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi, untuk hal-hal sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-bahan habis terpakai; spidol, buku tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. (4) Pembiayaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan layanan daya dan jasa : listrik, air, telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian batuan siswa transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi, (10) Pembiayaan pengloan BOS : ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah

Kata Kunci : Manajemen, dana BOS dan Mutu Pendidikan.

ABSTRAC

With the School Operational Assistance (BOS) fund program, the finances of the SD Negeri 024184 Binjai school each year the budget increases and is beneficial for the school, where the increase in the budget is in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of National Education Number 51 of 2011 concerning technical instructions for the use of BOS funds and BOS financial report for Fiscal Year 2019. There is participation of interested parties (principals, parents, community leaders, education observers, the business world, and other community members) to participate in incentives in the management of BOS funds. Planning for the use of BOS funds at SD Negeri 024184 Binjai, carried out is compiling RKTS. RKTS is a plan for obtaining education financing from various sources of income and the composition of an annual work program consisting of a number of routine activities as well as several other activities accompanied by details of the financing plan for one fiscal year. The use of BOS funds at SD Negeri 024184 Binjai, for the following matters: (1) financing all activities in the context of new student admissions, registration fees, form duplication, registration administration, and re-registration, as well as other activities directly related to the activity. (2) Purchase of learning textbooks and reference books for collection in the library. (3) Purchase of consumable materials; markers, notebooks, pencils, practical materials, student master books, inventory books, sugar, coffee, and tea for daily needs at school. (4) Daily refinancing, general examination, school exams and student learning outcomes reports. (5) Funding for student activities: remedial programs, enrichment programs, sports, arts, youth scientific works, scouts, youth red cross and so on. (6) Professional development of teachers: Training, KKG/MGMP and KJCKS/MKJCS. (7) School maintenance costs: painting, repairing leaky roofs, repairing doors and windows and other maintenance. (8) Financing of power services and services: electricity, water, telephone, including for new installations if there is already a network around the school. (9) Providing student transportation assistance for poor students who are facing transportation costs, (10) BOS financing: stationery, procurement, correspondence and report preparation. (11) To buy teaching aids, learning media and school

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga proposal ini dapat selesai dengan tepat waktu, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada ruh junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Dan penulis merasa bersyukur karena sudah bisa menyusun Proposal Tesis saya yang berjudul “ Manajemen Dana Bantuan Opreasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri 024184 Binjai”. Selama penyusunan proposal tesis ini, penulis memperoleh begitu banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Assoc. Prof, Dr. Akrim, M.Pd selaku pembimbing pertama dalam dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Indra Prasetia, S.Pd. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen PendidikanTinggi sekaligus sebagai pembimbing kedua dalam dalam penyusunan tesis ini.

Semoga tesis dapat memberikan pemikiran bagi semua orang khususnya penulis hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan peneliti ini nantinya.

Medan, September 2021

Penulis,

Milayanti Siregar
1920060081

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	25
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Uraian Temuan Penelitian.....	37
4.3 Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU otonomi daerah, Nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk

otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah di prioritaskan pada peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar (SD). Dan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Bantuan operasional sekolah adalah suatu dana bantuan dari pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional disuatu sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama. Bantuan operasional sekolah ini merupakan aplikasi dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus sekolah. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan program wajib belajar sembilan tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM yang sekarang disebut program BOS, perlu dilanjutkan Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 mengamanatkan bahwa

tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada ayat 2 berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada ayat 3 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945, khususnya ayat 3, maka pemerintah membuat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Sistem pendidikan nasional mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan untuk dapat mencetak manusia Indonesia yang berkualitas, maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan baik dari sisi intelektualitas dan keahlian pemerintah memberikan program desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah kebijakan penuh ada di sekolah masing-masing demi menunjang tercapainya efisiensi dan efektifitas manajemen sekolah, oleh karena itu manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Desentralisasi pendidikan memberikan dampak positif tidak hanya antar sekolah swasta namun juga sekolah negeri yang harus berfikir ulang untuk membenahi diri sehingga mampu bersaing juga dengan sekolah swasta, karena mereka menghadapi dua pilihan yang berat yaitu berubah dan memperbaiki diri atau sekolah tutup karena kehilangan siswanya. Sehingga tiap sekolah berlomba-lomba mempercantik diri sehingga mampu melenggang dengan cantiknya dan menarik banyak mata untuk tidak hanya melirik namun melihat mereka hingga membuat mereka untuk menentukan pilihan akan menimba ilmu di sekolah tersebut.

Berlakunya desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah juga memberikan dampak yang besar pada pembiayaan pendidikan, biaya pendidikan melambung tinggi sesuai kebijakan sekolah dan timbul suatu fenomena dunia pendidikan sekolah unggulan dengan biaya pendidikan yang mahal. Sebagaimana menurut Chomaidi (2005:1) hal ini yang menimbulkan kamufase yang terjadi dimasyarakat, dengan biaya mahal apakah diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terjamin, oleh karena itu desentralisasi sangat erat dengan manajemen pembiayaan dalam hal ini pembiayaan melalui program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Menurut Suhardan (2013:151) dengan pemberian BOS kepada sekolah diharapkan dapat membantu operasional sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, terkhusus bagi para siswa miskin. Oleh karena itu, BOS dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini

penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Disamping itu BOS juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa.

Berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti dilakukan di SD Negeri 024184 Binjai, bahwa penggunaan dana BOS masih kurang mendukung operasional dan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar yang ada di Sekolah Dasar tersebut. Hal ini dikarenakan BOS belum bisa memenuhi seluruh unit *cost* per siswa per bulan di sebabkan BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya rutin pendidikan di SD Negeri 024184 Binjai. Ditambah lagi adanya larangan kepada sekolah dasar untuk menarik apapun sumbangan dari orang tua. Padahal dana BOS yang diterima sekolah hanya Rp 66.600,00 per siswa/per bulan atau Rp 800.000,00 per siswa/tahun jelas tidak memadai. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang sedikit tertampung di SD Negeri Negeri 024184 Binjai.

Tabel 1 Alokasi Dana BOS dan Kebutuhan
di SD Negeri Negeri 024184 Binjai

No	Tahun	Jumlah Siswa	Penerimaan BOS (Rp)	Kebutuhan (Rp)/Tahun
1	2019	240	190.000.000,00	225.000.000,00
2	2020	243	151.200.000,00	205.000.000,00
3	2021	248	124.800.000,00	212.000.000,00

Berdasarkan tabel 1 di atas, minimnya jumlah penerimaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai di karenakan rendahnya tingkat partisipasi siswa untuk bersekolah, dan persoalan zonasi yang diberlakukan pemerintah, serta jumlah penduduk yang memenuhi usia sekolah di Kecamatan Binjai Timur sangat sedikit. Selain itu juga, Binjai Timur merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya dalam kategori menengah kebawah, ini juga sangat mempengaruhi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan adanya kesulitan dana, maka SD Negeri 024184 Binjai menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan, misalnya ekstra kurikuler, peningkatan kompetensi guru, sarana dan fasilitas belajar seperti perpustakaan, sarana ibadah, sarana olah raga sebab terhalang minimnya BOS yang diperoleh serta ada ketentuan penggunaan tersebut. Guru juga mendapat pengaruh negatif, karena guru yang sebelumnya biasa menerima pembayaran dari sekolah untuk kelebihan jam mengajar dan transportasi menjadi tidak ada. Sehingga, guru kurang bersemangat dalam mengajar dan ini jelas berpengaruh kepada kualitas pembelajaran. Keterlambatan dalam penyaluran dana BOS juga memberikan dampak negatif terutama Sekolah Dasar Negeri hanya mengandalkan dana BOS. Pembayaran honorarium untuk guru honor otomatis juga terlambat. Sehingga, menyebabkan kinerja dari guru menurun dan kualitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga menurun.

Namun meskipun demikian, ditengah persoalan minimnya penerimaan dana BOS tersebut tidak sepenuhnya menjadi kendala bagi SD Negeri 024184 Binjai untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran serta operasional sekolah, hal ini disebabkan manajemen pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara baik. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Sekolah Negeri 024184 Binjai Timur ini, diperoleh informasi bahwa mereka (sekolah) dapat mengelola dana BOS secara efektif meskipun dana BOS yang diterima oleh sekolah masih sangat terbatas. Namun demikian, terdapat juga permasalahan tentang minimnya dana BOS yang didapat pihak sekolah akibat jumlah siswa yang terbatas (sedikit) serta kendala pengalokasian dana untuk menunjukkan kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan sekolah sebab minimnya anggaran BOS yang diterima. Terutama untuk kegiatan operasional rutin, peningkatan sarana belajar dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni mencoba menganalisis dan mendeskripsikan manajemen dana BOS. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang **“Manajemen Dana BOS Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai”**.

1.2. Fokus Penelitian

Mengutip pendapat Mulyono (2010:192) menyatakan manajemen dana BOS yang baik yaitu (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, serta (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, serta (4) pengawasan, penggunaan dana BOS. Penggunaan dan BOS dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

Sekolah, menyangkut penggunaan sebagai berikut : (1) Pengembangan Perpustakaan, (2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, (4) Kegiatan Ulangan dan Ujian, (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, (6) Langganan daya dan jasa, (7) Perawatan sekolah, (8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, (9) Pengembangan profesi guru, (10) Membantu siswa miskin, (11) Pembiayaan pengelolaan BOS, (12) Pembelian perangkat komputer, dan (13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini yakni menganalisis manajemen dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai ditinjau dari aspek (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga dana BOS mampu mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut mencakup pada capaian prestasi siswa, peningkatan SDM guru dan sarana prasarana sekolah.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana manajemen dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasannya ?.
2. Bagaimana sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai mengelola dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran ?.
3. Bagaimana dampak manajemen dana BOS pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai mengelola dana bos untuk meningkatkan mutu pembelajaran ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai mengelola mengelola dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
3. Untuk mengetahui dampak manajemen dana BOS pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai mengelola dana bos untuk meningkatkan mutu pembelajaran ?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta informasi bagi semua civitas akademik tentang peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan yang konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
3. Bagi Penulis. Dapat menambah wawasan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan proses belajar sesuai dengan disiplin ilmu, terutama setelah terjun ke dunia pendidikan.

b. Manfaat Teoritis, yakni mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personal, sebagaimana menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2007:12) bantuan operasional sekolah dalam program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umumprogram BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untu untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personal bagi sekolah.

Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69

Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Harsono (2007: 154) penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya

- transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;

10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel sekolah.

Menurut Depertemen Pendidikan Nasional (2007:14) secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2.1.2 Program BOS dan Program Wajar Diknas 9 Tahun yang Bermutu

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1). Program pemerataan dan perluasan akses, (2) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:15) melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan wajib belajar Dikdas 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.

3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada siswa miskin yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
4. Kepala sekolah/madrasah/ponpes diharapkan mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana tambahan (BOS) untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun secepatnya.

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Harsono (2007:121) melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan. Namun demikian bagi warga sekolah dan masyarakat yang mampu masih diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.

3. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama dan akuntabel.

2.1.3 Mekanisme Pelaksanaan BOS

Mekanisme Pelaksanaan Mulai tahun 2007, pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:18) beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pengelolaan ini antara lain :

1. Pendanaan program BOS untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta (yang izin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan) adalah tanggung jawab Depdiknas, sedangkan untuk madrasah, pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya (yang izin operasionalnya berasal dari Departemen Agama) adalah tanggung jawab Depag.
2. Segala bentuk kegiatan yang mencakup proses pendataan, penyaluran dana, sosialisasi, pelaporan, monitoring dan penyelesaian kasus dilakukan oleh masing-masing departemen.
3. Penyaluran dana ke sekolah/madrasah/ponpes antara Depdiknas dan Depag harus diusahakan sesuai dengan jadwal.

Sebagaimana Kemendikbud (2011: 12) pengalokasian dana BOS dilakukan sebagai berikut :

1. Tim pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes melalui tim propinsi dan Kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.

2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes, tim pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA propinsi.
3. Tim propinsi dan tim Kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/ponpes.
4. Tim Kabupaten/kota menetapkan sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK Penetapan sekolah umum yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Dewan Pendidikan. Sedangkan SK Madrasah, ponpes salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditandatangani oleh Kepala Kandepag Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditanda tangani dilampiri daftar nama sekolah/madrasah/ponpes salafiyah dan besar dana Bantuan yang diterima. Sekolah/madrasah/ponpes yang menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
5. Tim Kabupaten/kota mengirimkan SK Alokasi dana BOS dengan melampirkan daftar sekolah/madrasah/ponpes ke Tim Propinsi, tembusan ke Pos/bank Penyalur dana dan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah/madrasah/ponpes perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut : (1) Alokasi BOS untuk periode Januari–Juni didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran yang berjalan, (2) Alokasi BOS periode Juli–Desember, didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran berjalan. oleh karena itu setiap sekolah/madrasah/ponpes diminta agar mengirim data jumlah siswa ke tim Kabupaten/kota, segera setelah masa pendaftaran selesai.

2.1.4 Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan

2.1.4.1 Manajemen Pembiayaan

Pengertian manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, material, machines, dan market*. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan (2011:7) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Hamalik (2006:176) menyebutkan manajemen adalah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.

Pembiayaan atau *financing*, menurut Muhammad (2005:21) yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Investasi sebagai suatu

konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efesisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pihak sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Menurut Mardiasmo (2005:134) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan pembiayaan adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.⁹Sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sekolah juga harus menjalankan pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan bisa jadi pendidikan tidak dapat berjalan dan amanat dari Undang-Undang dasar tidak akan terpenuhi. Biaya merupakan suatu unsur

yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diTimurkan Fattah (2008:141) bahwa:

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Menurut Muhammad (2005:76) manajemen pembiayaan pendidikan berbasis sekolah mencakup tiga pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh instansi atau organisasi di masa mendatang. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan penting yang lebih penting dibandingkan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan. Menurut Muhammad (2005:172) ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu: pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan

keputusan keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang akan dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan. Kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan mencapai tujuan Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

b. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Pembiayaan pendidikan berbasis sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni (1) penerimaan dan (2) pengeluaran atau penggunaan.

1. Penerimaan.

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang

digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah ada beberapa karakteristik yang identik.

2. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga admnitrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

Evaluasi dan Pertanggung Jawaban. Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai serta untuk mengukur pencapaian dari pelaksanaan. Evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia. Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara adminitrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan ditangani sebagai berita acara, dan kepala sekolah bertanggung jawab. Menurut Harsono (2007:151) pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan dan triwulan kepada Kepala

Dinas Pendidikan, Badan Adminitrasi Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.

2.1.4.2 Mutu Pendidikan

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak mungkin ada kegiatan pendidikan tanpa biaya, biaya tidak hanya berasal dari pemerintah, banyak sumber-sumber biaya dapat diperoleh lembaga salah satunya uang SPP siswa. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, ketersediaan biaya sangat menentukan capaian tujuan dan target pendidikan. Menurut Juran dalam Notoatmodjo (1998:12) jika disematkan pada satu produk, mutu ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) dimaksud untuk memenuhi hajat dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk itu didasarkan atas lima ciri utama; (a) teknologi; yaitu kekuatan; (b) psikologis, yaitu rasa atau status; (c) waktu, yaitu kehandalan; (d) kontraktual, yaitu ada jaminan mutu produk; dan (e) etika, yaitu sopan santun. Menurut Supriadi (2003:17) pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan. Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan (keterampilan), yang dilandasi oleh mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*) di ranah moral, etis, dan sosial. Supriadi lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang

integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dan proses pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada unsur pembiayaan didalamnya, oleh karena itu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan dalam mendukung penelitian ini beberapa diantaranya yakni :

1. Penelitian yang dilakukan Yusmina (2016) menjelaskan bahwa dana BOS sangat relevan dengan penningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa dana BOS yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak bagi mutu sekolah
2. Penelitian, Azizul, dkk (2015) menjelaskan bahwa manajemen yang baik terhadap dana BOS, mendorong tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Penelitian Abdillah, dkk (2009) menjelaskan bahwa pemberian dana BOS sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari akademik siswa, kualitas guru, sarana dan prasarana serta pembelajaran

4. Penelitian Yusnidani (20014) menjelaskan bahwa manajemen dana BOS memiliki pengaruh terhadap prestasi siswa dan pengembangan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
5. Penelitian Silitonga (2010) menjelaskan bahwa manajemen BOS sangat efektif dalam mencapai tujuan pendidikan jika dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang tinggi.

2.3. Kerangka Berfikir

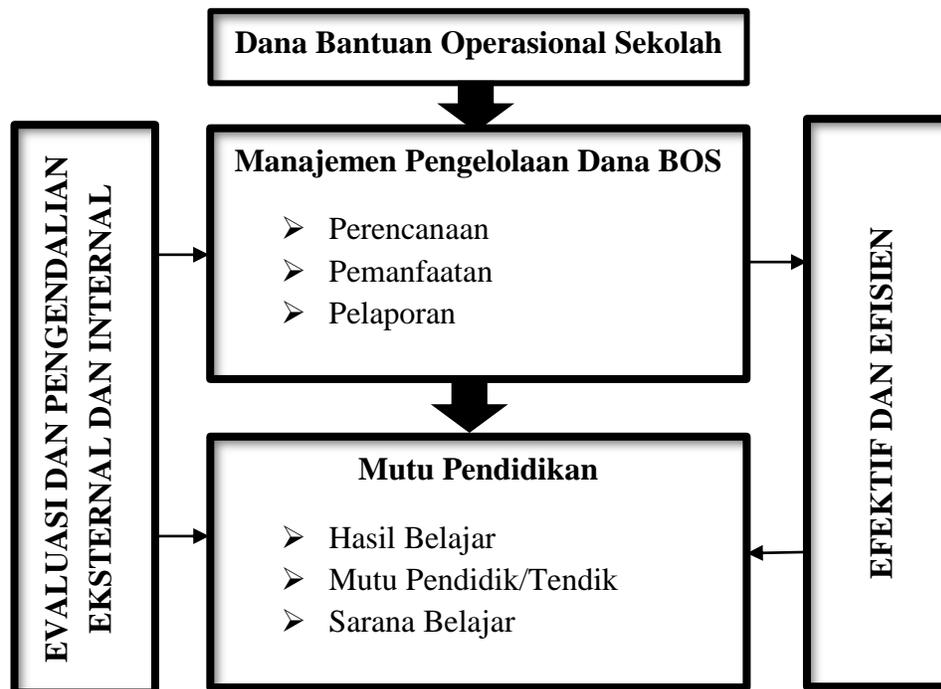
Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan terdapat beberapa sumber salah satunya dana BOS yang merupakan program pemerintah. Dana BOS diberikan kepada siswa yang kurang mampu agar bisa menjalankan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Pembiayaan dana BOS tidak hanya diberikan kepada sekolah atau madrasah formal, akan tetapi diberikan juga kepada lembaga nonformal seperti pondok pesantren yang melaksanakan program wajar dikdas 9 (Sembilan) tahun, dan telah memiliki piagam penyelenggaraan.

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya

mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Penyaluran dana BOS harus sesuai atau tepat sasaran, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, agar tidak terjadi kecurangan.

Berdasarkan fokus penelitian, hasil riset sebelumnya juga teori yang dijadikan acuan maka kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang dimaksud mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto (2006:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut Arikunto (2006:246) ada tiga macam pendekatan yang termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian kasus atau studi kasus (*case studies*), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelasi. Berkaitan itu, penelitian ini adalah penelitian studi kasus karena peneliti akan mengeksplorasi informasi maupun data temuan lapangan mengenai bagaimana manajemen pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri 024184 Binjai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di SD Negeri 024184 Binjai Timur Kota Binjai. Adapun waktu penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu dan Jadwal Penelitian

	Tahun 2021/2022								
		Juni	Juli	Agt	Sep	Nop	Des	Jan	Feb
Studi awal									
Penyusunan Proposal									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Perbaikan Proposal									
Pengumpulan Data									
Interpretasi Data									
Penyusunan Laporan									

3.3. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data apa yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Siswa.
2. Sumber data sekunder. Sumber data skunder yaitu sumber data tertulis yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer seperti buku, majalah, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Adapun dokumen resmi dalam penelitian ini adalah dokumen tentang profile sekolah, visi & misi, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) BOS, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, data guru, dan lainnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara.

Menurut Arikunto (2006:125) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Peneliti menggunakan pedoman interview semi struktur yaitu wawancara dengan menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur dengan global, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Wawancara ini dilakukan dengan menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga informan tidak merasa bahwa dirinya dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Siswa.

2. Observasi.

Menurut Iqbal (2011:174) observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan suatu alat. Metode ini adalah metode yang menggunakan pencatatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa kali pengamatan atau observasi ke sekolah agar peneliti dengan mudah dapat mengetahui bagaimana kondisi sekolah, letak geografis, kegiatan ekstrakurikuler, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang proses dan data lapangan.

3.5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian. Beberapa kegiatan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap data ditulisi data/satuannya, berasal dari sumber mana.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa saja yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dari chart.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa skripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian ini di tujukan untuk memaparkan SD Negeri 024184 Binjai yang merupakan tempat penelitian di laksanakan. Pemaparan deskripsi lokasi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian. Adapun hal-hal yang akan dipaparkan terdiri dari: (1) profil sekolah, (2) visi dan misi sekolah, (3) keadaan peserta didik Tahun Ajaran 2020/2021, (4) keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, (5) keadaan sarana dan prasarana sekolah, dan (6) struktur organisasi sekolah.

1. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : SD Negeri 024184 Binjai
- b. Nomor Statistik Sekolah : 101076104014
- c. Propinsi : Sumatera Timur
- d. Otonomi Daerah : Binjai
- e. Kecamatan : Binjai Timur
- f. Desa/kelurahan : Tunggurono
- g. Jalan dan Nomor : -
- h. Kode Pos : 20732
- i. Telepon : -
- j. Status Sekolah : Negeri

- k. Kelompok : -
- l. Akreditasi : A
- m. Tahun Berdiri : tahun 1975
- n. Kegiatan Belajar : Pagi - Sore
- o. Bangunan Sekolah : Tahun 1975
- p. Status Tanah : Milik Pemerintah

SD Negeri 024184 Binjai merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang ada di Binjai Timur yang berdiri pada tahun 1975 dengan menempati areal tanah seluas $1.512 m^2$. SD Negeri 024184 Binjai terletak di wilayah antara perbatasan Kota Binjai dan Deli Serdang.

2. Visi dan Misi Sekolah

Setiap sekolah pastilah memiliki visi dan misi yang di gunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan sekolah masing-masing. Visi dari SD Negeri 024184 Binjai adalah “Menjadikan sekolah terpercaya di masyarakat dalam rangka mensukseskan wajib belajar”. Sedangkan Misi dari SD Negeri ini adalah sebagai berikut: (1). Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi dibidang IMTAQ dan IPTEP berdasarkan pancasila dan UUD 1945, (2). Membentuk sumber daya manusia yang kreatif, reaktif dan inovatif sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman.

3. Keadaan peserta Didik Tahun Ajaran 2019/2020

Peserta didik merupakan komponen utama terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Tanpa peserta didik, proses pembelajaran di sekolah tidak akan terlaksana. Jumlah peserta didik di SD Negeri 024184 Binjai tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 379 orang yang terdiri dari 197

laki-laki dan 182 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik di SD Negeri 024184 Binjai tahun ajaran 2019/2020 tergolong banyak untuk satu sekolah. Dengan jumlah peserta didik di kelas I yaitu berjumlah 60 orang yang terdiri atas 33 laki-laki dan 27 perempuan. Pada kelas II berjumlah 69 peserta didik yang terdiri dari 31 laki-laki dan 38 perempuan. Pada kelas III berjumlah 47 peserta didik yang terdiri dari 29 laki-laki dan 18 perempuan. Pada kelas IV berjumlah 73 peserta didik yang terdiri dari 36 laki-laki dan 37 perempuan. Pada kelas V berjumlah 79 peserta didik yang terdiri dari 37 laki-laki dan 42 perempuan. Pada kelas VI berjumlah 51 peserta didik yang terdiri dari 31 laki-laki dan 20 perempuan. Keadaan peserta didik yang demikian menjadikan kelangsungan belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan efektif.

4. Keadaan Pendidik dan Tenaga kependidikan

Pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, sedangkan tenaga kependidikan bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. SD Negeri 024184 Binjai tahun 2019/2020 memiliki 18 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah yang berjenis kelamin laki-laki yang merupakan lulusan S1, guru PNS yang berjumlah 10 orang, guru honorer 5 orang, guru olahraga dan guru agama 1 orang, guru SBK 1 orang. Beberapa guru kelas merupakan lulusan S.1 dan terdapat pula guru kelas lulusan S.PdG. Guru honorer merupakan lulusan S.1. setiap pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki tugasnya masing-masing.

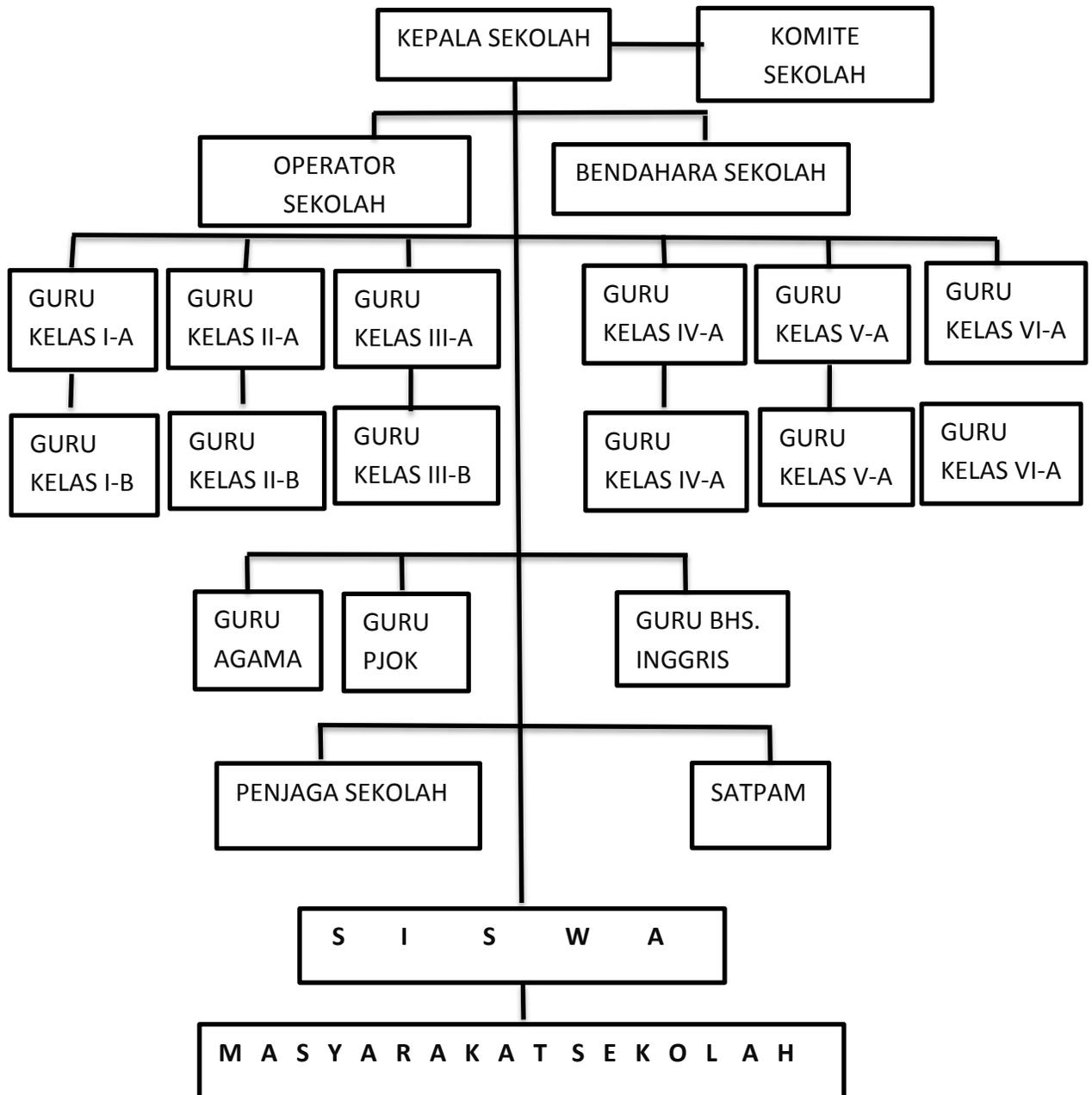
5. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai akan memperlancar kegiatan belajar mengajar, sebaliknya sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. SD Negeri 024184 Binjai menempati areal tanah seluas $1.512m^2$. sekolah memberikan sekolah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut berupa kantor guru, gudang, toilet, UKS. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 024184 Binjai keadaannya cukup baik dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah.

6. Struktur Organisasi Sekolah

Adapun struktur organisasi SD Negeri 024184 Binjai sebagai berikut:



4.2. Uraian Temuan Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak adanya program dana bantuan operasional (BOS) dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola melalui badan Kementerian

Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun anggaran 2006 telah banyak manfaatnya bagi satuan pendidikan. Hal ini dituangkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal dengan istilah BOS untuk tingkat SD sampai dengan SMA/Sederajat, sehingga tidak ada lagi pungutan biaya sekolah alias biaya pendidikan liar. Program dana BOS yang lahir ini sudah dirasakan oleh pihak SD terkhusus SD Negeri 024184 Binjai ditinjau dari aspek manajemen yakni (1) perencanaan, (2) pemanfaatan dan (3) pelaporan yang dampaknya terhadap peningkatan mutu sekolah ditinjau dari (1) peningkatan hasil belajar siswa, (2) pengembangan kompetensi guru, dan (3) peningkatan sarana belajar di sekolah.

Sebagaimana uraian di atas, berikut pemamaparan temuan penelitian terkait dengan “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 024184 Binjai”, ditinjau dari beberapa aspek sebagaimana diuraikan berikut.

1). Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sebagaimana menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS SD untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SD. Pemberian kebebasan ini mencakup perencanaan pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing sekolah penerima Dana BOS SD. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Kepala SD Negeri 024184 Binjai menyebutkan bahwa :

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai,...sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan Dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.” (Wawancara, 22 September 2021, Pukul 10.00 – 11.00 wib)

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang guru senior SD Negeri 024184

Binjai yang menerangkan:

Saya bertugas di SD Negeri selaku pengajar sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sejak Tahun Anggaran 2006 telah diterima oleh pihak sekolah SD kami sampai dengan tahun anggaran saat ini. (Wawancara, 22 September 2021, Pukul 10.00 – 11.00 wib).

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat dikatakan sejak adanya program dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri 024184 Binjai setiap tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana pertambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2019 yang telah menetapkan jumlah besaran dana Bos yang diterima oleh pihak sekolah didasarkan pada perkalian jumlah siswa setiap tahunnya. Selain itu, dalam perencanaan Dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran Dana BOS SD. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RAB BOS SD. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan kepada Komite Sekolah, yang kemudian akan disetujui atau ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas pertimbangan dari Komite Sekolah.

Selain itu, dalam perencanaan dana BOS, pihak sekolah menyusun rencana BOS berkaitan dengan perencanaan kegiatan tahun 2019 diantaranya data kesiapan menyelenggarakan Ujian Nasional serta data siswa kelas akhir yang akan mengikuti Ujian Nasional baik UNBK maupun UNKP; Data RKAS dan Realisasi BOS sampai dengan Oktober 2019, serta jumlah tenaga guru dan kependidikan diluar PNS. Selain itu, sebagaimana temuan dilapangan bahwa semangat dan antusias seluruh Sekolah Dasar

penerima BOS menyampaikan perencanaan dana BOS oleh pihak sekolah telah sesuai antara perencanaannya dengan realisasi dan pemanfaatan BOS, bagaimana dana yang telah diarahkan penggunaannya agar dapat termanfaatkan secara maksimal. Sebagaimana wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 024184 Binjai menyebutkan bahwa :

Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sekolah, dilakukan secara efisiensi, dan manfaatnya sesuai kesesuaian dengan *outcome* yang telah di prediksi. Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. (Wawancara, 22 September 2021, Pukul 10.00 – 11.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri seara finansial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi. MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri seara finansial. Dengan demikian,

masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang, arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Perencanaan dalam anggaran dana BOS ialah kegiatan merencanakan sumber dana bantuan operasional sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Hasil penelusuran dilapangan, diketahui bahwa perencanaan dana BOS oleh SD Negeri 024184 Binjai mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah atau RKTS. Adapun Kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Pengembangan Rencana Kerja Tahunan Sekolah. Proses pengembangan ini pada umumnya menempuh langkah-langkahpendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada tingkat kelompok kerja. Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala (guru dan wakil kepala sekolah) memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak menggunakan kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan yang tersedia.
- b. Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RKTS
- c. Sosialisasi dan legalitas. Pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RKTS kepada pihak Dinas Pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Berdasarkan hasil analisis pada aspek perencanaan di atas, dalam perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai, hal utama dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RKTS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah

nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKTS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RKTS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD. Pelaksanaan BOS yang telah dilaksanakan di SD Negeri 024184 Binjai sangat bermanfaat dalam penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global.

2). Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai

Setiap organisasi memerlukan suatu pengelolaan agar proses kegiatan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan suatu organisasi dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah SD Negeri 024184 Binjai tentang bagaimana pemanfaatan BOS apakah sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan atau pemanfaatan dana BOS, memperoleh jawaban bahwa:

Pengelolaan dana bos di SD Negeri 024184 Binjai Alhamdulillah sudah berjalan dengan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos, namun dalam pengelolaan dana bos ini terkadang banyak kendala-kendala yang di dapat dalam proses pencairan dana BOS, tetapi itu semua terlaksana dengan baik berkat kerjakeras semua staf-staf di sekolah dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan dana bos juga dilakukan dengan pembukuan dan publikasi kepada wali murid. Tim pengelola dana bos juga melakukan atau melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos baik dari segi swakelola, pelaporan dan pembukuan, transparan, saling percaya, demokratis dan keefektifan. Semua pengelolaan berpanduan pada juknis dana bos yang telah ditetapkan pemerintah (Wawancara, 16 September 2021, Pukul 10.00 – 10.30 Wib)

Secara tidak langsung manfaat BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu.

Hasil wawancara dengan Guru Kelas IV SD Negeri 024184 Binjai menyebutkan bahwa :

Penggunaan dana BOS untuk pendidikan sangat dirasakan manfaatnya cukup banyak. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tahap awal penerapan program ini di sekolah adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. (Wawancara 16 September 2021, Pukul 10.00 – 11.00 wib).

Sebagaimana uraian di atas, bahwa program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sejalan dengan itu, merangkum hasil wawancara peneliti dengan para guru di SD Negeri 024184 Binjai menyebutkan bahwa “ melalui program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus

memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun; (2) tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah; (3) lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP; (4) kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara, apabila terdapat peserta didik SMP yang akan putus sekolah agar diajak kembali ke bangku sekolah; (5) kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel; (6) BOS bukan penghalang bagi peserta didik, orang tua, atau walinya dalam pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah”.

Hal-hal di atas menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. BOS adalah bantuan biaya operasional sekolah namun bukan penghalang bagi sumbangan sekolah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan para guru di SD Negeri 024184 Binjai, dimana para guru juga menilai bahwa apa yang dikerjakan sekolah sudah sesuai dengan juknis dana bos. Artinya, dalam hal ini pengelolaan dana bos di SD Negeri 024184 Binjai sesuai dengan yang ada dalam juknis tersebut. Pengelolaan dana bos yang dilakukan melalui proses pembukuan dan pelaporan bersama tim dana bos. Namun dalam hal penggunaan untuk pembangaunan sudah terbilang cukup baik tetapi masih kurang memadai dalam standar pendidikan nasional karena keterbatasan dana yang diperoleh, karena dana bos ini tidak bisa untuk dijadikan satu-satunya pegangan dalam pembangunan. Artinya, SD SD Negeri 024184 Binjai ini masih membutuhkan dana lain untuk pembangunan yang memadai dalam standar pendidikan nasional, selain itu juga memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu dengan dan bos, yaitu dengan menyediakan sarana belajar seperti seragam sekolah, dan tas. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa pengelolaan dana bos di SD Negeri 024184 Binjai masih berjalan sesuai dengan koridor atau ketetapan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos. Selain itu, penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Agar setiap sekolah dapat menggunakan dana BOS sesuai ketentuan penggunaan dana dan untuk mengukur seberapa besar ketepatan penggunaan dana BOS pada setiap sekolah, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan ketentuan penggunaan. Disamping itu, penggunaan dana BOS di sekolah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara lain kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah yang harus di daftar sebagai salah satu sumber RAPBS disamping dana yang diterima dari pemda atau sumber lain.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi di lapangan, rangkuman temuan penelitian di SD Negeri 024184 Binjai, bahwa dana BOS digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku teferensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-bahan habis terpakai; spidol, buku tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di

sekolah. (4) Pembiayaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan layanan daya dan jasa : listrik, air, telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian bantuan siswa transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi, (10) Pembiayaan pengloaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Prointas utama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen I s/d 12. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi peranannya dari BOS dan masih dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah.

3). Pengawasan Dana BOS SD Negeri 024184 Binjai

Secara umum, ukuran keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS melalui mekanisme pelaporan tertulis penggunaan dana BOS oleh sekolah kepada pemerintah. Pengukuran pengawasan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai dilakukan dengan bantuan UPTD atau tim BOS Kecamatan sebagai tangan kanan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat SPJ dan Pembukuan. Selain itu, pengawas penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai melalui proses laporan kepada komite sekolah melalui pertemuan rutin setiap triwulan sekali, dan tim manajemen BOS Kabupaten. Dalam pelaporan, pihak Sekolah telah melakukan proses komunikasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah, misalnya dapat berkonsultasi dengan UPTD perihal yang belum jelas ataupun konsultasi mengenai

pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 024184 Binjai, menjelaskan :

Pada dasarnya proses pengawasan penggunaan dana BOS melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, melibatkan komite sekolah dan juga pengawas dari dinas Pendidikan, terkait dengan konsultasi, pihak sekolah senantiasa berkonsultasi. Bila belum mendapat jawaban dari UPTD, bisa ditanyakan langsung ke Tim Manajemen BOS Kabupaten. (Wawancara 16 September 2021, Pukul 09.00 – 11.00)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa alur mekanisme pelaporan dana BOS, dapat dijelaskan untuk alur pengawasannya yaitu dengan cara SD membuat laporan pertanggungjawaban yang di kirim ke UPTD, selanjutnya UPTD melakukan rekap laporan dan rekap di kirim ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, sekolah juga laporan langsung ke pusat melalui yang dikirim secara online melalui aplikasi pelaporan dana BOS yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SD Negeri 024184 Binjai diperoleh informasi bahwa kepala sekolah telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah. Adapun pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah berupa memeriksa laporan keuangan yang terkait dengan penggunaan dana BOS setiap bulan, Kepala Sekolah juga sering melakukan komunikasi dengan bendahara terkait dengan dana yang sudah dikeluarkan dengan melihat langsung apakah barang yang dibeli itu ada, sehingga Kepala Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan. Selain Kepala Sekolah rutin mengadakan pengawasan setiap akhir bulan sekolah juga rutin membuat laporan secara triwulan kepada dinas.

Selanjutnya, wawancara dengan para pengurus komite sekolah di SD Negeri 024184 Binjai, memperoleh kesimpulan bahwa untuk publikasi dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai telah transparan. Sebagaimana wawancara dengan komite SD Negeri 024184 Binjai menyebutkan bahwa :

Penggunaan dan pengawasan dana BOS di sekolah sudah transparan, konkretnya ialah ketika ada rapat penyusunan RAPBS pihak sekolah selalu menampilkan gambaran keuangan sekolah lewat LCD, dulu sempat di print dan dibagikan kepada semua yang hadir namun, karena dianggap boros kertas akhirnya hanya di print beberapa, namun tetap ditampilkan lewat LCD ketika ada pertemuan. Sejauh dari hasil wawancara saat ini sekolah telah berusaha untuk mengalokasikan dana BOS sesuai dengan RAPBS yang telah disusun pada awal tahun pelajaran. (Wawancara 12 September 2021, Pukul 10.00 – 11.30)

Disamping itu, wawancara dengan komite SD Negeri 024184 Binjai juga memperoleh informasi bahwa

Laporan dana BOS sudah sesuai pedoman dana BOS..., pelaporan merupakan penanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiaya dana BOS dan setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. Semua kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah dilakukan SD Negeri 024184 Binjai sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BOS.

Keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai tentunya tidak lepas dari peran sekolah, UPTD, Pengawas, Komite dan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam melaksanakan program dana BOS. Dalam pengawasan, sekolah pada hakikatnya mempunyai peran keterbukaan dengan memberikan paparan serta bukti penggunaan dana BOS berbentuk laporan SPJ atau pembukuan saat ada pertemuan yang dilaksanakan setiap triwulan. Tentunya tim manajemen Bos dan kepala SD mempunyai peran dalam pembuatan laporan sebagai acuan pengukuran hasil sebagai wujud pengawasan. Laporan yang dibuat mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan, untuk tata cara administrasi dan format laporan tidak banyak mengalami perubahan sehingga

memudahkan untuk melakukan pengukuran hasil dan perbedaannya bisa dilihat dari tahun ke tahun. Selain melakukan pemaparan terhadap laporan BOS, setiap sekolah juga diwajibkan untuk melakukan laporan secara online. Selain itu, dalam pengawasan laporan penggunaan dana BOS SD, pemerintah sudah menerapkan sistem on line, dilakukan dengan bantuan teknologi yaitu BOS online dan data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). BOS online berfungsi untuk upload laporan sehingga langsung diterima oleh Tim Manajemen BOS Pusat.

Sebagaimana penelusuran peneliti di lapangan, tentang website BOS online dan juga hasil wawancara dengan Pengawas SD Negeri 024184 Binjai dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa:

Website BOS berisikan informasi mengenai penggunaan dana per komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan. Sedangkan, Dapodikdasmen berfungsi untuk menjangkau data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yaitu BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. Dapodikdasmen telah mulai dijalankan pada tahun 2015 sebagai langkah awal, tapi masih dibarengi dengan sistem manual. Menurut petunjuk teknis sekolah diwajibkan melakukan laporan secara online dilakukan setiap triwulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan dengan adanya laporan online tersebut, Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat memantau dan mengendalikan sekaligus mendorong agar sekolah-sekolah tertib dalam memberikan laporan sebagai langkah pengawasan. Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa proses pelaporan BOS ada dua macam yaitu laporan BOS online yang langsung ke Pusat dan laporan melalui UPTD. Laporan yang diserahkan pada UPTD dalam bentuk hardcopy. Berkaitan dengan BOS, Dinas Pendidikan Kota Binjai membangun sarana komunikasi melalui telepon seluler yaitu melalui telepon, sms dan aplikasi *whatsapp* untuk mempermudah

komunikasi antar pelaksana dan pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten dan tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota Binjai berperan untuk mengingatkan dan melakukan pembinaan untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya penyimpangan dana BOS dilapangan.

Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari pihak UPTD dilapangan, guna pengawasan bahwa Dinas Pendidikan sebagai tim manajemen BOS di Kota Binjai dalam mengatasi penyimpangan dengan melakukan teguran secara lisan maupun tertulis dan perbaikan laporan kepada pihak sekolah penerima dana BOS. Namun, dalam hal untuk pemberian sanksi, Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi, sedangkan sanksi dilakukan oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat. Dalam hal sanksi, terdapat dua jenis sanksi dalam hal penyelenggaraan, yakni administratif dan kepegawaian. Sanksi administratif yaitu, untuk menanggukhan cairan dana sementara waktu, sedangkan untuk memberhentikan cairan dana tidak diperkenankan. Namun, terkadang di pihak Dinas tidak terjadi adanya penanggukan karena kesalahan tersebut bisa teratasi sehingga tidak sampai adanya penanggukan. Sanksi kepegawaian yaitu, adanya penurunan pangkat golongan (bisa kepada kepala sekolah, guru atau semua tim manajemen BOS di sekolah), namun selama ini, penyimpangan penggunaan dana tidak pernah terjadi di SD Negeri 024184 Binjai. Selain sanksi tersebut, bila ada penyimpangan penggunaan dana, maka sekolah atau oknum yang melakukan harus mengembalikan dana tersebut melalui bendahara atau transfer ke bank, dan selanjutnya akan diproses sanksi lainnya oleh pihak pemerintah. Agar dana tersebut bisa digunakan kembali sesuai aturan yang ada di Juknis. Namun demikian, pada umumnya penanganan penyimpangan dinilai sudah maksimal dan Dinas Pendidikan tetap terus

berusaha untuk meningkatkan pembinaan karena masih ada yang belum sepenuhnya memahami Juknis dan penggunaan dana BOS.

4) Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di SD Negeri 024184 Binjai

Untuk melihat dampak langsung dari program BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan tentulah merupakan hal yang sulit. Karena program BOS memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tetapi kontribusi program BOS terhadap peningkatan kualitas dan mutu sekolah memiliki fase yang berjenjang. Secara historis program BOS lebih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak didik untuk mengecap pendidikan. Persoalan dana yang selama ini dianggap menjadi kendala utama anak didik dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, setidaknya bisa terurai dengan adanya BOS ini. Dengan demikian situasi terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif bisa terjadi, karena persoalan mendasar tersebut sudah coba ditangani oleh pemerintah. Walau tidak menafikan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang harus dibenahi untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan berkualitas, tetapi setidaknya dengan mengurai persoalan dana tersebut, syarat dasar terlaksananya pendidikan sudah dipenuhi. Dengan meningkatnya partisipasi anak didik di sekolah, dan terbantunya sekolah dalam melaksanakan PBM, diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor lain yang membuat program BOS tidak bisa diukur langsung pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara nasional adalah karena program BOS hanya dialokasikan untuk siswa SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat serta SMA/ Sederajat. Artinya masih butuh proses yang panjang untuk melihat kontribusi

program BOS terhadap pengembangan SDM dan lainnya di sekolah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran program BOS telah membantu para siswa, orang tua siswa dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Program ini sangat berkontribusi besar terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Adanya program BOS ini setidaknya telah membantu para orang tua mengurangi biaya yang harus ditanggung untuk menyekolahkan anak. Walau label “sekolah gratis” belum bisa terwujud sepenuhnya oleh program BOS ini, akan tetapi sebagaimana juga diklaim pemerintah bahwa dampak BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang. Banyak orang tua siswa yang mengaku bahwa dengan adanya program BOS ini, biaya yang harus mereka keluarkan untuk membiayai anak menjadi lebih ringan. Dengan demikian pihak sekolah pun menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan, karena beban biaya sebagian besar sudah ditanggulangi dana BOS.

Dengan demikian, kontribusi konkrit program BOS terkhusus di SD Negeri 024184 Binjai ini, dapat dijelaskan mampu mendongkrak kualitas pembelajaran di sekolah sebagaimana yang diharapkan. Peran penting dana BOS bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah terkhusus di SD Negeri 024184 Binjai, diperoleh dari keterangan wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 024184 Binjai sebagaimana pertanyaan tentang bagaimana relevansi pengelolaan dana bos terhadap mutu pendidikan di sekolah, memperoleh informasi:

Dalam proses belajar mengajar tentu dan pasti sekolah manapun membutuhkan dengan adanya sarana prasarana yang memenuhi standar agar bisa terlaksana dengan baik agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam

undang-undang. Untuk itu dibutuhkanlah dana untuk menunjang sarana prasarana yang baik agar terlaksana proses belajar mengajar yang diinginkan. Dengan adanya program pemerintah yaitu bantuan operasional sekolah ini sangatlah membantu dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya dana bos ini sekolah bisa memberikan dana untuk renovasi atau perbaikan ruangan belajar yang sudah cukup layak dalam dunia pendidikan. Dan dengan dana BOS, sekolah bisa mengembangkan perpustakaan yaitu membeli dan memelihara buku teks pelajaran untuk para siswa dan bisa menjadi pegangan bagi para guru yang sesuai dengan kurikulum SD (Wawancara, 16 September 2021, Pukul 08.00 – 09.30 wib).

Demikian juga hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah SD Negeri 024184

Binjai menjelaskan bahwa:

Bantuan operasional sekolah ini sangatlah menguntungkan bagi sekolah dalam mengadakan proses belajar yang efektif dan efisien. Artinya, semua pengelolaan dana bos harus direlevankan dengan proses belajar agar bisa menghasilkan proses belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan siswi. Apalagi di sekolah ini masih banyak ruangan yang ingin direnovasi untuk proses belajar mengajar yang nyaman, karena di sekolah ini memisahkan ruangan belajar dengan ruang lainnya...dan membutuhkan dana lebih dengan adanya dana Bos ini sangatlah membantu dalam merenovasi ruangan yang kurang layak. (Wawancara, 18 September 2021, Pukul 10.00 – 10.30 wib).

Kemudian, wawancara dengan Guru Kelas II SD Negeri 024184 Binjai juga memperoleh informasi bahwa:

Pemberian dan pengalokasian dana bos oleh pemerintah sudah cukup relevan dengan proses belajar mengajar di sekolah kami, karena didalam proses belajar mengajar kami tidak mendapatkan kendala-kendala misalnya bangku-bangku siswa dan siswi tidak ada ditemukan yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Siswa yang kurang mampu atau miskin pun menerima bantuan dari dana BOS yaitu dengan dipenuhinya seragam sekolah siswa sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar. (Wawancara, 18 September 2021, Pukul 11.00 – 12.30 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, terungkap bahwa relevansi pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar sangatlah relevandan besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terkhusus di SD Negeri 024184 Binjai. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dana bos yang di terima

sekolah ditujukan untuk berbagai kegiatan penunjang proses belajar mengajar di sekolah, terkait peningkatan pengajaran guru, pelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Relevansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 024184 Binjai ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai, buku-buku pelajaran tersedia secara lengkap, alat tulis di kelas tersedia, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa juga turut meningkat guna mendorong peningkatn mutu belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap proses belajar mengajar yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga peserta didik yang kurang mampu juga bisa merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi.

Pada dasarnya, masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah, dan harapannya dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pengurus komite sekolah saat acara Hut Kemerdekaan RI di aula Dinas Pendidikan Kota Binjai. Secara umum para pengurus komite sekolah menyebutkan bahwa:

BOS sangat membantu masyarakat dan sekolah,...tahap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu”. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan BOS menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah (Wawancara, 17 Agustus 2021, Pukul 11.15 – 12.30 wib).

Dapat diuraikan dari penjelasan di atas, bahwa program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dapat peneliti simpulkan dari berbagai informasi di lapangan bahwa melalui program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah
3. Lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP
4. Kepala sekolah telah mendorong peserta didik SD yang lulus dan melanjutkan sekolah di SMP
5. Kepala sekolah telah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel
6. BOS berguna untuk meringankan bagi orang tua, atau walinya dalam pembiayaan pendidikan siswa, dan pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Sebagaimana diketahui bahwa alokasi dana BOS di SD tiap sekolah satu tahun anggaran. untuk besar biaya satuan BOS yang diterima SD Negeri 024184 Binjai termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/SDLB di kota Rp.400.000,00/siswa/tahun,
2. SD/SDLB di kabupaten Rp.397.000,00/siswa/tahun,

Selain itu juga, informasi yang diperoleh dilapangan bahwa pelaksanaan BOS telah terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target. Hal ini diukur dengan

penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga yang harus di tandatangi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Cara tersebut di anggap efektif dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah yang dituju. Kemudian, pengambilan dana BOS dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai keperluan sekolah. Pasalnya, dengan dana BOS yang ada seyogyanya telah membantu pemerintah daerah meringankan biaya operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini membuktikan bahwa BOS digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah yang telah mampu memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS tersebut kepada siswa yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana.

Sebagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di sekolah terkhusus di SD Negeri 024184 Binjai, data dilapangan menjelaskan bahwa penggunaan BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD

adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, sedangkan sarana belajar lainnya seperti computer, ATK dan lainnya.

Secara umum penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai dapat dikategorisasi untuk membiayai kegiatan berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda motor, mesin genset dll).

12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
13. Pembelian komputer (*desktop/work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel sekolah.

Sebagaimana uraian di atas, jelas sesungguhnya program BOS sebagai bantuan pendidikan sangat relevan bagi peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih perlu dimonitoring dan evaluasi oleh semua pihak yang berkepentingan secara sungguh-sungguh untuk merealisasikan mutu dan penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global. Dengan adanya bantuan dana BOS, kesempatan bagi para masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan menjadi sangat mungkin. Dengan pendidikan, maka masyarakat Indonesia akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih tinggi.

4.3. Pembahasan

Bidang pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia. Karena, pendidikan merupakan jalan utama untuk

bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa. Peningkatan kualitas mutu pendidikan harus dijadikan prioritas utama. Pemerintah atau dalam hal ini Kemdiknas sebagai salah satu elemen yang paling penting dalam negara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam tujuh tahun belakangan ini, suatu program Kemdiknas yaitu penyaluran bantuan dana untuk sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cukup membantu peningkatan sisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas pendidikan, terutama pendidikan formal dapat dilihat melalui proses belajar mengajar yang diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didiknya. Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan pendidikan yang berkualitas, banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang muncul. Pada umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan proses belajar mengajar di berbagai sekolah. Suatu proses merupakan hal yang terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Maka, proses belajar yang optimal akan dapat mendidik para siswa-siswi menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, kemampuan serta daya saing sebagai dasar untuk menempuh tingkatan pendidikan yang selanjutnya. Dan tujuan pendidikan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat tercapai.

a. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri 024184 Binjai

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan terdahulu di atas, terkait dengan “Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 024184 Binjai”, dapat dijelaskan bahwa secara umum menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 024184 Binjai melalui proses manajemen yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan (pemanfaatan dan penggunaan) dan pengawasan, (2) penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun alokasi dana pada tiap-tiap item sekolah berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai digunakan untuk pembelajaran praktek dan prasarana penunjangnya, sarana kegiatan pembelajaran dan komponen lain seperti honor guru ekstrakurikuler, kegiatan ujian, bahan ATK dan transportasi yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai digunakan lebih diutamakan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, ujian, honor guru, bahan ATK dan transportasi, (3) Kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 024184 Binjai bisa dikatakan baik, hal ini bisa dilihat pada masalah sarana dan prasarana sekolah yang dapat teratasi dengan baik dengan tersedianya dana BOS, adanya guru ekstrakurikuler, peningkatan nilai rata-rata pada tiap-tiap kelas, serta output 100% lulus UASBN pada tiap tahunnya. Kualitas guru di SD Negeri 024184 Binjai juga bisa dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi guru yang telah semuanya di sertifikasi. Demikian juga prestasi akademik siswa, baik nilai mata pelajaran maupun ekstrakurikuler di lihat dari jumlah penghargaan yang diperoleh di setiap perlombaan beserta peningkatan jumlah siswa baru dan pencapaian kelulusan 100%.

Pengelolaan dana BOS melalui perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan sebagaimana temuan penelitian ini menjadi sangat penting. Mengingat dana BOS sepenuhnya diperuntukan untuk kemajuan sekolah, maka setiap pihak yang berkaitan dengan sekolah (orang tua/wali peserta didik, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kelompok peduli pendidikan), harus mengetahui alur penggunaan dana BOS. Perencanaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi dana BOS harus diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan sekolah. Pada titik ini transparansi pengelolaan dana BOS sangat diperlukan. Sejalan dengan itu, Bafadal (2012:12) bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka mendanai kegiatan operasional sekolah guna menungjung pendidikan. Dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah bentuk perhatian pemerintah dalam menungjung penyelenggaraan pendidikan sekolah. Melalui upaya pendanaan ini, diharapkan aktualisasi atas delapan standar nasional pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Artinya, penggunaan dana BOS yang sesuai dengan perencanaan yang baik berkonsekuensi logis pada laporan yang baik yang akhirnya dapat meningkatkan mutu sekolah.

Sebagai sebuah sistem sekolah harus merencanakan anggaran dan kegiatan-kegiatan sekolah secara terjadwal dan sistematis. Dalam hal perencanaan dan penggunaan dana-dana sekolah dalam sistem tidak bisa dilakukan hanya oleh kepala sekolah atau bendahara eorang diri. Perencanaan harus melibatkan seluruh unsur yang berkaitan dengan sekolah. Keterlibatan usur sekolah tidak berhenti pada tahap perencanaan. Penggunaan dana BOS harus sepengetahuan seluruh unsur sekolah. Sehingga laporan dana BOS yang disampaikan kepada semua pihak di sekolah, lebih merupakan evaluasi dan refleksi atas

pencapaian penggunaan anggaran, bukan perdebatan atas angka-angka fulus. Sekolah terkadang menghadapi persoalan keterbatasan waktu (untuk pertemuan pelaporan penggunaan dana BOS). Sebagaimana menurut Sugiono (2015) ada beberapa solusi di antaranya, sekolah dapat menyiapkan papan informasi perencanaan dan penggunaan dana BOS. Sekolah dapat juga melaksanakan kegiatan pertemuan bersama orang tua per triwulan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk pembahasan tentang tantangan, peluang, dan kemajuan sekolah. Selain itu sekolah juga dapat mengirim laporan pertanggungjawaban kepada dewan komite sekolah, atau sekolah-sekolah di kota dapat mempublikasikan perencanaan dan penggunaan dana BOS di website resmi sekolah. Sesuai namanya, dana operasional sekolah adalah dana yang diperuntukan untuk keberlangsungan dan kemajuan sekolah sekolah. Perencanaan, pengimplementasian dan pertanggungjawaban dana BOS sejatinya dilakukan secara bersama-sama. Transparansi pengelolaan dana operasional sekolah menuntut partisipasi optimal dari setiap unsur sekolah.

Sekolah sebagai suatu entitas sekolah harus mampu mengelola dana BOS secara profesional dan akuntabel untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas yang akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Aspek penting pengelolaan dana BOS menurut Mulyasa (2012) dari sisi manajemen keuangan, MBS menurut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Demikian menurut Minarti (2011) pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan,

kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tiap tahunnya. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis setiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparansi.

Dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Dimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya.

b. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kualitas Guru di SD Negeri 024184 Binjai

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional, karena itu tuntutan terhadap profesionalisme guru yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting. Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara finansial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan. Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (*skill labour*) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi. Satu sisi kondisi guru demikian memprihatinkan, namun di sisi lain tuntutan profesionalisme guru semakin dikedepankan. Kunandar (2011:48) menyebutkan kualitas profesionalisme guru juga ditunjukkan oleh lima sikap yakni: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Sebagaimana temuan penelitian menunjukkan bahwa ada efek dana BOS dengan peningkatan kualitas guru di sekolah. Sebagaimana temuan penelitian dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan, maka pengembangan guru di sekolah menjadi sangat penting. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh SD Negeri 024184 Binjai dalam meningkatkan profesionalitas guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan seperti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya yang didukung oleh dana BOS. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Rugaiyah (2011: 23) menyebutkan guru profesional adalah guru yang memiliki kualitas pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada peserta didik, mempunyai jiwa kreatif, inovasi, dan produktif, mampu memotivasi siswa, mampu mengkaitkan dengan lingkungan siswa, dan mampu mengintegrasikan berbagai bidang studi menjadi suatu konsep yang utuh, serta mempunyai keinginan untuk selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Menurut Soetjipto (1992:76) pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data,

pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertip administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dana BOS yang diberikan untuk sekolah dikelola dengan baik, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012, bahwa program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

c. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah di SD Negeri 024184 Binjai.

Pada proses pembelajaran di sekolah memang guru dan siswa merupakan faktor yang dominan, karena keduanya lebih menentukan berhasil atau tidaknya dalam sebuah proses pembelajaran yang ada. Faktor yang lainnya hanya bersifat pendukung yang tergantung dengan cara penerapan yang baik oleh guru maupun siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, agar semua sumber daya yang ada terutama berupa alat atau media dapat bermanfaat semaksimal mungkin, maka perlu adanya upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan agar dapat menjadi pendukung proses pembelajaran dan kualitas sekolah dapat meningkat.

Arikunto, (2008: 273) menyebutkan sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana.

Sebagaimana Susilo (2008:24) sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran, adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas saran dan prasarana. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai banyak digunakan untuk pengembangan saran dan prasarana, seperti perpustakaan yaitu untuk membeli buku-buku teks pelajaran bagi siswa dan guru untuk mendukung proses pembelajaran, dan peningkatan jumlah sarana computer pustaka dan laboratorium serta tata usaha sekolah, alat-alat tulis kantor. Selain itu, bahwa dana BOS mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu

sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

Dalam hal promosi, sekolah juga memasang spanduk sekolah bebas pungutan biaya di depan sekolah. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di SD Negeri 024184 Binjai untuk membeli alat-alat ekstrakurikuler dan sekolah menggunakan dana BOS juga untuk proses pembelajaran kontekstual. Sekolah juga melakukan pengadaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Demikian juga untuk lomba-lomba siswa. Komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian sekolah juga menggunakan dana BOS. Sehingga siswa tidak dipungut biaya/gratis pada saat menjelang ujian tengah semester (UTS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan ujian sekolah. Aspek sarana prasarana pendukung di SD Negeri 024184 Binjai juga menggunakan dana BOS dalam pembelian bahan habis pakai seperti membeli buku tulis, pensil, spidol, dan bahan praktikum untuk laboratorium baik IPA, Bahasa, dan Komputer. Berdasarkan pemanfaatan dana BOS tersebut, jelas bahwa pemberian dana BOS kepada sekolah sangat berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Program dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri 024184 Binjai setiap tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana penambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2019.
2. Ada partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif dalam pengelolaan dana BOS.
3. Perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai, dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.
4. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 024184 Binjai, untuk hal-hal sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku teferensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-

bahan habis terpakai; spidol, buku tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. (4) Pembiayaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan layanan daya dan jasa : listrik, air, telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian batuan siswa transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi, (10) Pembiayaan pengloaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan temuan-temuan penelitian ini, peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar program BOS di SD Negeri 024184 Binjai dapat terlaksana dengan baik dan mampu mendongkrak kualitas pembelajaran di sekolah maka penggunaannya harus dikelola dengan baik, menyangkut perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pengawasannya.
2. Agar dana BOS dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, maka harus melalui proses perencanaan yang baik. diantaranya menyusun anggaran dan pengembangan

rencana kegiatan tahunan sekolah atau RKTS. Perencanaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi dana BOS harus diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan sekolah.

3. Agar program BOS terlaksana dengan baik maka pemanfaatannya untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Rineka Cipta
- Bafadal, Ibrahim. (2012). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Chomaidi. (2005). *Peranan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*”, Disampaikan di Depan Rapat Senat Terbuka UNY, 15 Oktober 2005
- Dadang Suhardan. (2013). *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Inventarisasi dan Kajian Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Diknas.
- Fattah, Nanang. (2000). *Ekonomi Dan Pembiayaan*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Fathurrohman, M. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional*. Jakarta: Pustaka.
- Harsono (2007) *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: pustaka book publisher.
- Hasan, Iqbal, (2011). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Iskandar, J. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Indek dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga
- Muhammad Joko Susilo. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, H. E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. E. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Kunandar. (2011). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Malayu Hasibuan, (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah : Mengelola Lembaga pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media
- Miftah Thoha (2004), *Perilaku Organisasi. Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad (2005). *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Nanang fattah. (2013). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Oemar Hamalik. (2006) *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Priatna, Nanang dan Tito Sukamto. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono, R.K.A. (2015). *Pengaruh Ketepatan Dana, Kecukupan Dana dan Sasaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (Praktik Penelitian)*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Suyanto dan Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Soekidjo, Notoatmodjo (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, Dedi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan*, Bandung: PT Rosda Karya.

- Wirjana, Bernardine R. 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas: Organisasi, Kinerja, Program*. Yogyakarta: ANDI.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN 1 : CONTOH ANGGARAN BOS PADA SEKOLAH DASAR

Rincian anggaran dan kegiatan

No. Urut	No. Kode	URAIAN	Jumlah (dalam Rp)	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I		KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN					
1		PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU/PPDB	13,000,000			13,000,000	
2		MASA ORIENTASI SISWA/MOS	6,000,000			6,000,000	
II		KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)					
1		MEMBUAT RENCANA PERANGKAT PEMBELAJARAN	4,000,000	2,000,000		2,000,000	
2		BAHAN PEMBELAJARAN	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3		PELAKSANAAN ULANGAN HARIAN					
		a. Penggandaan Soal dan LJK	36,400,000	5,800,000	12,000,000	6,000,000	12,600,000
		b. Pengayaan, Remedial dan analisis	15,000,000	3,500,000	4,000,000	3,500,000	4,000,000
4		PELAKSANAAN ULANGAN TENGAH SEMESTER/					
		MID SEMESTER					
		a. Penggandaan Soal dan LJK	5,000,000		1,350,000		3,650,000
		b. Pengayaan, Remedial dan analisis	7,000,000		3,500,000		3,500,000
		c. ATK	1,000,000		500,000		500,000

5		PELAKSANAAN ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL					
---	--	--	--	--	--	--	--

		a. Pengadaan Naskah Ulangan/Soal	9,715,200				9,715,200
		b. Pengayaan, Remedial dan analisis	2,500,000				2,500,000
		c. ATK	2,250,000				2,250,000
6		PELAKSANAAN ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP					
		a. Pengandaan Soal dan LJK	6,535,600		6,535,600		
		b. Pengayaan, Remedial dan analisis	2,500,000		2,500,000		
		c. ATK	1,800,000		1,800,000		
7		PHOTO SISWA/I KELAS IX (180 siswa X Rp.20.000,-)	3,600,000	3,600,000			
8		PELAKSANAAN LATIHAN UJIAN SEKOLAH DAN MID SEMESTER GENAP TP.2016/2017					
		a. Pengadaan Naskah Soal LUS	3,361,600	3,361,600			
		b. Transport Pengawas	3,000,000	3,000,000			
		c. Pengandaan Naskah Soal Mid Semester Genap	5,000,000	5,000,000			
9		PELAKSANAAN LATIHAN UJIAN NASIONAL (LUN)					
		a. Naskah Soal LUN	3,056,000	3,056,000			
		b. Transport	3,000,000	3,000,000			

		Pengawas					
		c. Honor Panitia	2,000,000	2,000,000			
		d. Komsumsi Pengawas	1,500,000	1,500,000			
		e. ATK	500,000	500,000			
10		PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH (US)					
		a. Pengadaan Naskah	2,542,000		2,542,000		
		b. Transport Pengawas	1,200,000		1,200,000		
		c. Honor Panitia Semester	3,050,000		3,050,000		
		d. Komsumsi Pengawas/Panitia Semester	936,000		936,000		
		e. Koreksi Hasil US	1,500,000		1,500,000		
11		PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN)					
		a. Transport Panitia Ujian Nasional	4,000,000		4,000,000		
		b. Honor Panitia Ujian Nasional	3,500,000		3,500,000		
		c. Konsumsi Pengawas/Panitia Ujian Nasional	2,500,000		2,500,000		
		d. ATK Ujian Nasional	1,000,000		1,000,000		
		e. Penulisan Ijazah (166 X Rp.10.000,-)	1,660,000		1,660,000		
12		BIMBINGAN BELAJAR SISWA/I KELAS IX	13,000,000	13,000,000			
		BIMBINGAN BELAJAR TERPADU SISWA/I KELAS IX	4,000,000		4,000,000		
III		KEGIATAN KESISWAAN					

1		Lomba-lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	3,000,000			3,000,000	
2		Pesantren Kilat	5,000,000			5,000,000	
3		Class Meeting	10,000,000		3,000,000		7,000,000
4		Kegiatan Osis/Lomba-Lomba	8,000,000		5,000,000		3,000,000
5		Kegiatan OSN,O2SN,FLS2N	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
6		Pengadaan P3K dan UKS	5,000,000	1,000,000		2,500,000	1,500,000
7		Kegiatan Ekstrakurikuler	10,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000
8		Kegiatan Home Visit	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
IV		PENGADAAN BUKU SEKOLAH					
1		Buku Pelajaran	106,200,000		82,000,000	24,200,000	
2		Buku Refrensi Perpustakaan	4,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000
V		PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU GURU DAN KARYAWAN SEKOLAH					
1		MGMP Tingkat Kabupaten	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2		Kegiatan MKKS Tingkat Kabupaten/Provinsi	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
3		Penataran Guru dan TU	5,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
VII		KESEJAHTERAAN GURU DAN KARYAWAN					
1		Honor Pegawai Tidak Tetap/PTT	15,600,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
2		Honor Guru Tidak Tetap/GTT	8,400,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
3		Pesuruh Sekolah/Penjaga Sekolah	9,600,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000

4		Satpam	7,200,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
5		Honor Pelatih Pramuka	4,800,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
VIII		PENGADAAN SARANA PBM					
1		Pembelian Alat-alat Olah Raga	3,000,000		1,700,000	1,300,000	
2		Pembelian Alat-alat Kesenian	2,800,000	700,000	700,000	700,000	700,000
3		Pembelian Alat Kebersihan Kelas	8,393,600	1,500,000	3,000,000	1,100,000	2,793,600
4		ATK Perpustakaan	4,000,000		2,000,000	1,000,000	1,000,000
5		Lemari alat-alat seni	2,000,000	2,000,000			
IX		PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RINGAN					
1		Perawatan Meublear Kelas dan Kantor	3,600,000	1,800,000			1,800,000
2		Perawatan Taman Sekolah	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3		Perawatan Gedung Sekolah	15,000,000		10,000,000		5,000,000
4		Perawatan/Perbaikan Kunci Kelas dan WC	5,000,000	750,000	1,250,000		3,000,000
X		BELANJA HABIS PAKAI					
1		Peralatan Kelas (Tinta, Spidol, Penghapus, DLL)	30,000,000	8,982,400	13,117,600	5,100,000	2,800,000
2		ATK, Kertas, Foto Copy, dan Barang Habis Pakai	21,000,000	7,800,000	5,708,800	5,400,000	2,091,200
3		Belanja Komsumsi					
		a. Komsumsi Rapat Dinas	9,600,000	2,400,000	2,400,000	1,200,000	3,600,000
		b. Gula, Teh, dan Kopi	10,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
		c. Air Galon dan Aqua Gelas	4,000,000	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000

XI		LANGGANAN DAYA DAN JASA					
1		Langganan Surat Kabar	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
2		Langganan BBM Bensin	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
3		Langganan Bahan Bakar Gas	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4		Langganan Listrik	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5		Langganan Modem Sekolah	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
XII		BIAYA PENGELOLA BOS					
1		Insentive Pengelola	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2		Materai, ATK, Transport, Surat, dan Penggandaan	1,000,000	250,000	250,000		500,000
		Jumlah	551,000,000	110,200,000	220,400,000	110,200,000	110,200,000

LAMPIRAN 2 : ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

LEMBAR OBSERVASI

MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

A. Pedoman Observasi

No	Variabel	Indikator	Item Yang Diobservasi
1.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu sekolah diberi kebebasan dalam pengelolaan keuangan sesuai kondisi dan kebutuhan.2. Ada RAKS yang disesuaikan dengan RKT dan RKJM3. Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan Anggaranb. Pelaksanaan Anggaranc. Evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem manajemen sekolah, struktur organisasi sekolah, job diskripsi guru, dan staf tata usaha.2. RAKS, RKT dan RKJM3. Bagaimana langkah-langkah perencanaan anggarannya4. Bagaimana sistem pembelanjaan, dan pembukuan anggaran yang masuk dan keluar5. Bagaimana evaluasi, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

B. Pedoman Interview

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
----	----------	-----------	-----------------

1.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu sekolah diberi kebebasan dalam pengelolaan keuangan sesuai kondisi dan kebutuhan. 2. Ada RAKS yang disesuaikan dengan RKT dan RKJM 3. Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Anggaran b. Pelaksanaan Anggaran c. Evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sekolah menggunakan MBS ? 2. Apakah sekolah membuat RAKS yang sesuai dengan RKT dan RKJM ? 3. Bagaimana perencanaan anggarannya ?, <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, pengelola mengidentifikasi tujuan sekolah ? b. Apakah ada skala prioritas untuk suatu kegiatan atau program dalam merencanakan anggaran ? c. Apakah tujuan yang hendak dicapai dijabarkan dalam bentuk operasional
----	--	--	---

			yang dapat diukur ?
			<p>d. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam merencanakan anggaran ?</p> <p>4. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan</p>

C. Pedoman Dokumentasi

No	Variabel	Indikator	Item Yang Diobservasi
1.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<p>1. Menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS)</p> <p>2. Ada RKAS yang disesuaikan dengan RKT dan RKJM</p> <p>3. Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi :</p> <p>a. Perencanaan Anggaran</p> <p>b. Pelaksanaan Anggaran</p> <p>c. Evaluasi dan pertanggungjawaban</p>	<p>1. Struktur organisasi sekolah</p> <p>2. dokumen kurikulum</p> <p>3. dokumen RKAS, RKT dan RKJM</p> <p>4. Juknis BOS</p> <p>5. Dokumen Laporan pertanggungjawaban BOS</p>

		Anggaran	
--	--	----------	--

LAMPIRAN 3 : PEDOMAN INTERVIEW UNTUK PENGELOLA DANA BOS

PERTANYAAN TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN

1. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, pengelola mengidentifikasi tujuan sekolah ?
2. Apakah ada skala prioritas untuk suatu kegiatan atau program dalam merencanakan anggaran ?
3. Apakah tujuan yang hendak dicapai dijabarkan dalam bentuk operasional yang dapat diukur ?
4. Apakah dalam mencapai tujuan tersebut menggunakan analisi cost effectiveness ?
5. Apakah pengelola merekomendasikan alternatif pendekatan yang akan dipakai untuk mencapai tujuan kegiatan sekolah ?
6. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam merencanakan anggaran ?

PERTANYAAN TENTANG PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, pengelola menggunakan mekanisme tertentu yang berlaku ?
2. Bagaimana bentuk mekanisme penyusunan anggaran yang digunakan dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ?
3. Apakah program-program anggaran dirumuskan secara jelas ?
4. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam persiapan penyusunan anggaran ?

PERTANYAAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Apakah dalam pelaksanaan anggaran BOS, pengelola melakukan pembukuan ?
2. Buku apa saja yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS ?
3. Bagaimana teknis mencatat penerimaan dana BOS ?
4. Bagaimana teknis pencatatan pengeluaran dana BOS ?
5. Bagaimana membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS ?

6. Kapan dan bagaimana teknis pelaporan dana BOS ?
7. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam melaksanakan anggaran ?

PERTANYAAN TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Apakah pengelola anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS ?
2. Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS ?
3. Siapa saja yang bertindak melakukan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS ?
4. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana BOS ?
5. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam pelaksanaan penilaian anggaran ?